BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai salah satu unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pemerintahan daerah diwajibkan melakukan pengukuran kinerja dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dengan menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP).

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan/Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Dalam Negeri Tahun Anggaran.

B. STRUKTUR,TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari :

1. 1 (satu) Kepala Kantor
2. 1 (satu) Kepala Sub Bagian yaitu bagian tata usaha.
3. 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu : Kepala Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan ,Kepala Seksi Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, dan Kepala Seksi Pengembangan Politik dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Massa.

Secara Umum Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian tata usaha dan 3 (tiga) kepala seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan program, keuangan kepegawaian, administrasi umum. Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi antara lain :
   1) Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
   2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
   3) Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan
   4) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran
   5) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam urusan pemerintahan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Fungsi seksi pengembangan nilai-nilai kebangsaan antara lain :
   1) Menyusun rencana dan program seksi
   2) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan
   3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan

4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembaruan bangsa dan kewarganegaraan
5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara
6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa
7) Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala seksi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam urusan pemerintahan bidang pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik. Fungsi seksi ini adalah :
   1) Menyusun rencana dan program seksi
   2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hak azasi manusia, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
   3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi analisis potensi konflik sosial
   4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan ganguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
   5) Menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi sosial
   6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah dan keamanan
   7) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas
   8) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
   9) Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik
   10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala seksi pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam urusan pemerintahan bidang pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa. Fungsi kepala seksi ini adalah :
   1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
   2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik
   3) Menyiapkan bahan perum usan kebijakan dan fasilitasi pendidikan politik
   4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan budaya politik
   5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik
   6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik
   7) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan
   8) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan partisipasi politik
   9) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik
   10) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantauan dan pelaporan
   11) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantapan dan pelaporan
   12) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi profesi
   13) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat
   14) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan.

Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri per Desember 2019 terdiri dari 15 (Enam Belas) pegawai negeri sipil, 9 (sembilan) tenaga kontrak daerah, 2 (Dua) Tenaga sukarela dan 7 (Tujuh) ptt kegiatan. Adapun daftar nama berdasarkan urut kepangkatan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Gol/ Ruang	Eselon	Ket
1	2	3	4	5	6
PEGAWAI NEGERI SIPIL					
1	Abdul Hamid, S.Pd	Kepala Kantor	IV/b	III.a	
2	Henny Sasmitha, ST	Kasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik	III/c	IV/a	
3	Drs. Amiruddin DH, M.Si	Kasi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	IV/b	IV/a	
4	Muhammad Ahmad, S.AP	Kasubag Tata Usaha	III/c	IV/a	
5	Rizky Syahputra, S.IP	Kasi pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa	IV/b	-	
6	Karyadi	Staf Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	II/d		
7	Ahmad	Staf pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa	II/c	Ahmad	
8	Sofyan	Staf Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	II/c	-	
9	Adi Jayadi	Staf sub bagian Tata Usaha	II/b		
10	Sri Hariyati	Staf sub bagian Tata Usaha	II/b		
11	Rahmat Hidayat	Staf pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik	II/b		
12	Dedi Iskandar	Staf pengembangan	II/a	-	

		politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa			
13	ST. Saifah	Staf sub bagian Tata Usaha	I/c	-	
14	Maman Firmansyah, SE	Staf sub bagian Tata Usaha	III/a	-	
15	Firmansyah	pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik	II/c	-	
PEGAWAI TIDAK TETAP					
17	Ariful Yahya.,S.P	Staf Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik	-	-	Kontrak Daerah
18	Ardiansyah	Staf pengembangan politik dan fasilitasi orpol dan ormas	-	-	Kontrak Daerah
19	Denjisana.,S.Pd	Staf pengembangan politik dan fasilitasi orpol dan ormas	-	-	Kontrak Daerah
20	Egit Irman Fadeta.,S.Pd	Staf Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	-	-	Kontrak Daerah
21	Hasanuddin	Staf pengembangan politik dan fasilitasi orpol dan ormas	-	-	Kontrak Daerah
22	Hattamuddin	Staf Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	-	-	Kontrak Daerah
23	Paimin	Staf Sub Bagian Tata Usaha	-	-	Kontrak Daerah
24	Sahrul Bahri	Staf Pengkajian Masalah Strategis dan	-	-	Kontrak Daerah

		Penanganan Konflik			
25	Syaifullah	Staf Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik	-	-	Kontrak Daerah
Tenaga Sukarela					
26	Daud Zabur	Staf Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik	-	-	Tenaga Sukarela
27	Ahmad	Staf pengembangan politik dan fasilitasi orpol dan ormas	-	-	Tenaga Sukarela
28	Ovi Putra Pandinata, SE	Staf Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik	-	-	Tenaga Sukarela
PTT Kegiatan					
29	Bilhusnah.,S.Pd	Staf Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik	-	-	PTT Kegiatan
30	Hulya Latifah,A.Md	Staf pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa	-	-	PTT Kegiatan
31	Roni Noval Putra Arta.,S.Adm	Staf Sub Bagian Tata Usaha	-	-	PTT Kegiatan
32	Rosida	Staf pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa	-	-	PTT Kegiatan
33	Eva Agusrini, SE	Staf Sub Bagian Tata Usaha	-	-	PTT Kegiatan

34	Hania, SE	Staf Sub Bagian Tata Usaha	-	-	PTT Kegiatan

C. ISU-ISU STRATEGIS

- Bidang Politik

Untuk memantapkan stabilitas politik, harus dilakukan upaya-upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta makin mantapnya peningkatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kurangnya pengetahuan tentang politik di tengah masyarakat menjadi salah satu penghambat jalannya demokrasi secara efektif, efisien dan stabil sehingga dapat memicu adanya perpecahan melalui isu perbedaan pilihan politik.

- Bidang Ekonomi

Gejolak perekonomian nasional terutama fluktuasi harga kebutuhan dasar masyarakat, sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang ekonomi di daerah. Adapun pengaruh-pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah semakin menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut diatas dipengaruhi lagi dengan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan meningkatnya jumlah tenaga kerja sehingga akan menambah jumlah pengangguran dan menciptakan kesenjangan ekonomi. Kondisi seperti ini tentu sangat rentan menimbulkan terjadinya kerawanan sosial seperti pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.

- Bidang Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi aspek kehidupan yang lain, terutama kondisi ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menurun dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja sehingga menambah jumlah pengangguran dan kesenjangan ekonomi tentu mengakibatkan beban hidup yang semakin berat bagi masyarakat. Kondisi seperti ini cenderung menimbulkan dan membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Disamping itu, menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengalamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

dan beredarnya penyakit-penyakit sosial seperti pelacuran, perjudian, minuman keras, kekerasan pada anak, dan lain-lain, yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, dimana semua orang dapat mengakses informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian dan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat masih termasuk dalam kategori rendah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) , pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun keatas yaitu 7,68 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat hanya menempuh pendidikan formal sampai dengan kelas 1 di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat diwujudkan sepenuhnya, karena masih ada penduduk usia SD/MI, dan SMP/MTS yang belum mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Disamping itu permasalahan lain yang terkait dengan dunia pendidikan adalah masih rendahnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru pada berbagai jenjang pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

- Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat beragama Islam sebanyak 264.080 jiwa, diikuti yang beragama Hindu sebanyak 10.400 jiwa, Katolik sebanyak 1.860 jiwa, Protestan sebanyak 1.591 jiwa dan yang paling sedikit beragama Budha sebanyak 379 jiwa. Sampai saat ini, kondisi kerukunan antar umat beragama di kabupaten Sumbawa Barat terbina dengan baik. Nilai-nilai kerukunan yang meliputi toleransi, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama senantiasa teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus perusakan terhadap rumah ibadat dan konflik yang

bernuansa agama tidak pernah ter jadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan akan muncul dan berkembangnya aliran kepercayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi kebangsaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dan konflik keagamaan di masyarakat.

- Kebudayaan

Kabupaten Sumbawa Barat dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Suku terbesar sebagai suku asli adalah suku Sumbawa Barat dan hidup berdampingan dengan suku-suku lain sebagai suku pendatang yaitu suku-suku Bugis, Sasak, Mbojo, Jawa, Madura dan Bali. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tingkat kesadaran masayarakat akan pentingnya toleransi dan daya tangkal masyarakat terhadap isu-isu SARA rendah.

- Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, peran dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat sangat penting, termasuk Orkesmas dan LSM.

Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Warga masyarakat bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini jumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembaga. Namun untuk penanganan ormas di Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki payung hukum sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mengacu kepada rencana strategis Kantor Kesatuan dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2021. Rencana strategis tersebut memiliki beberapa komponen yang terdiri atas : visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

1. MISI

Misi Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021

1. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal.
2. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.
3. Meningkatkan Keterpaduan Keserasian dan Kesinambungan Pengembangan Kehidupan Berpolitik.
4. Meningkatkan Keterpaduan, Keserasian, dan Kesinambungan Pemantapan Stabilitas Keamanan di Daerah

Misi Kementerian Dalam Negeri dan Bakesbangpoldagri NTB mejadi acuan misi Kantor Kesbangpoldagri KSB periode 2016 - 2021 dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap misi daerah.

2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian/keberhasilan atau kegagalan. Faktor ini diperlukan sebagai faktor pendukung utama strategi pilihan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan Dari hasil analisa dan pengkajian, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah dengan paradigma baru pemerintahan.
2. Kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi dan toleransi.
3. Komunikasi, interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.
4. Dukungan dan peran serta masyarakat, Parpol/Ormas, Toga/Toma, LSM dan Perguruan Tinggi.
5. Sumberdaya yang memadai.
6. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik.
7. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik,
8. Pengawasan yang efektif dan transparan.

Tabel

KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU

No.	BIDANG	MASALAH	ISU
1.	**SUBBAG TATA USAHA**	1. Kualitas Sumber Daya Manusia kurang memadai. 2. Sistem dan tata kelola Informasi masih lemah. 3. Sarana, prasarana dan dana pendukung kegiatan yang kurang memadai. 4. Konsistensi bidang tugas masih belum sesuai	Pelayanan yang kurang professional

2.	**SEKSI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN**	1. Kurang tegasnya pemerintah dalam penegakan hukum 2. Hak masyarakat dalam memperoleh keadilan dicederai oleh para penegak hukum 3. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan Kader Bela Negara dan Pendidik Wawasan kebangsaan yang belum terbina	belum dipahami arti pentingnya wawasan kebangsaan

		4. Menurunnya rasa kebangsaan terutama bagi kalangan generasi muda hal ini disebabkan oleh banyaknya pengaruh asing merambah masuk pada sendi- sendi kehidupan bangsa seperti budaya, agama dan kehidupan sosial lainnya. 5. Gaya hidup masyarakat sudah tidak mencerminkan budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sesungguhnya, sehingga pada ujungnya sikap skeptis dan pragmatis muncul dimana-mana. 6. Adanya paham luar yang berkaitan dengan dochmatism, paham dan aliran-aliran keagamaan yang mengarah ke radikalisme akhir- akhir ini juga sering menjadi permasalahan dan ancaman	

3.	**SEKSI PENGEMBANGAN POLITIK DAN FASILITASI ORPOL/ORMAS**	1. Masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun-tahun berlangsungnya pengembangan sistem politik sebagai akibat tuntutan reformasi; 2. Berkembangnya sikap saling kurang menghargai terutama dalam prespektif politik masing- masing kelompok yang terkait dengan persoalan budaya politik; 3. Fluktuasi meningkatnya eskalasi politik pada waktu-waktu tertentu, sejalan dengan fase-fase Agenda Politik dan Kebijakan Nasional ataupun pada kejadian-kejadian tertentu yang berdampak luas	Minimnya pendidikan politik masyarakat

4.	**SEKSI PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS DAN PENANGANAN KONFLIK**	1. Daya tangkal masyarakat terhadap isu-isu yang belum dipastikan kebenarannya relative masih rendah sehingga mudah terprovokasi 2. Masih adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh sebagian warga dikarenakan rendahnya toleransi. 3. Masih adanya perkelahian antar warga / kelompok 4. Indikasi masih lemahnya Integrasi nasional dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, baik hubungan vertikal Pemerintahan Nasional dan Daerah ataupun hubungan antar Pemerintahan Daerah Serta Antar Institusi. 5. Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi 6. Kesenjangan multidimensi, memiliki potensi memecah belah masyarakat yang dapat menjadi awal dari terjadinya disintegrasi. 7. Peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum sepenuhnya efektif. 8. Pemerintah belum memiliki kapasitas dan kemampuan	Konflik Sosial dan Politik dimasa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan

B. TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan

  Tujuan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi Perangkat Daerah yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi eselon IV, dengan demikian jumlah tujuan yang ingin dicapai paling tidak minimal sebanyak eselon IV.

- Sasaran

  Sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung tujuan atau mendukung tugas pokok tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula
1	2	3	4	5
I	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia	Pengukuran aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi
		Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA didaerah	Jumlah desa/kelurahan rawan berkembang isu SARA dibagi jumlah desa/kelurahan

		Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik	Jumlah rencana aksi dibagi jumlah potensi konflik di daerah
		Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT
II	Mewujudkan pelayanan internal yang prima		Tingkat pelayanan sesuai SOP	Jumlah jenis layanan dibagi jumlah SOP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran
			Nilai SAKIP	Kategori Nilai Lakip

D. PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator tujuan /sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2018
1	3	4	5
I		Indeks Demokrasi Indonesia	65
	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA didaerah	0%
	Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik	100%
	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	85%

II		Tingkat pelayanan sesuai SOP	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	95%
		Nilai SAKIP	CC

Dokumen perjanjian kinerja terlampir pada laporan ini

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan gambaran Anggaran dan Sumber Daya tahun 2018 yang telah dialokasikan dan dapat diketahui tingkat capaian kinerja serta kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja.

SASARAN 1: Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat

Rapat TIM PAKEM

No	Indikator Kinerja Utama	Real. 2016	Real. 2017	2018		Capaian kinerja 2019 terhadap (%)				Capaian kinerja s.d 2019 terhadap target akhir RPJMD		Capaian kinerja s.d 2019 terhadap target nasional	
				Target	real	Real. 2016	Real. 2017	Real. 2018	Target 2019	Target/kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasioal	Capaian kinerja (%)
1	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA di daerah	0	0	0	0	100	100	100	100	0	100	-	-

Dari jumlah Desa/Kelurahan rawan berkembang isu SARA adalah 65 desa dan 7 kelurahan, tidak terdapat indikasi isu SARA sehingga capaian kinerja mencapai target dengan kata lain 100%.

- Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran" **Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat"** adalah dengan telah terbentuknya Forum-forum / mitra kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat yang telah terbentuk dan berjalan sejak tahun 2016 dan masih aktif hingga saat ini namum masih belum maksimal karena forum dimaksud masih sebatas tingkat kabupaten, sementara menurut surat edaran dari Menteri Dalam Negeri harus dibentuk hingga tingkat desa/kelurahan dengan tujuan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan sasaran yang dimaksud, adapun forum/mitra kerja yang dimaksud terdiri dari :

  a. **Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mempunyai tugas sbb :**
     - Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
     - Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
     - Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
     - Merumuskan rekomendasi kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;
     - Membantu Kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
     - Memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait dalam Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

  b. **Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) mempunyai tugas sbb :**
     - Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Aliran Kepercayaan;
     - Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Keagamaan yang ada di tengah-tengah Masyarakat;
     - Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Aliran Kepercayaan;
     - Merumuskan rekomendasi kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan aliran kepercayaan;
     - Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan kerukunan umat beragama;

- Memfasilitasi hubungan kerja Antara Kelompok Kerja Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan.

c. Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas sbb :

- Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Menyusun uraian tugas kepengurusan;
- Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lai berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja
- Melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten /kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

d. Kader Bela Negara mempunyai tugas sbb:

- Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan upaya peningkatan kesadaran bela Negara;
- Menyusun program kerja kegiatan pembentukan dan pembinaan kader bela Negara;
- Mengkoordinasi dan menfasilitasi kegiatan pembentukan dan pembinaan kader bela Negara;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa Barat.

e. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa di kabupaten sumbawa barat.

- Pencapaian keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh keselarasan sasaran dengan program/kegiatan yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan meliputi:

1. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
2. Penyelarasan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
3. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

4. Pembentukan dan Pembinaan Kader Bela Negara
5. Pendidikan Wawasan kebangsaan

❖ Pencapaian sasaran " **Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat"** dengan indikator tidak terdapat indikasi isu SARA sehingga capaian kinerja mencapai target, didukung oleh anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 345.138.000,- sampai 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 334.374.000,- (96,88) terdapat efisiensi anggaran mencapai 3,22 persen dengan pencapaian fisik 87,03 persen.

SASARAN 2: Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Konflik di Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Real. 2016	Real. 2017	Real. 2018	2019		Capaian kinerja 2019 terhadap (%)				Capaian kinerja s.d 2019 terhadap target akhir RPJMD		Capaian kinerja s.d 2019 terhadap target nasional	
					Target	real	Real. 2016	Real. 2017	Real. 2018	Target 2019	Target/ kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasioal	Capaian kinerja (%)
1	Tingkat Kewaspadaan Dini terhadap isu konflik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Jumlah konflik sosial di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 tercatat 12 konflik meliputi konflik sengketa lahan 2 kasus (wilayah Taliwang dan Telonang), demo masyarakat 24, Tapal Batas (wilayah Poto Tano dan Kertasari-Tua Nanga) 2 Kasus dan operasi gabungan pengamanan Warga Negara Asing yang menyalahi ijin tinggal sebanyak 8 kasus sehingga capaian kinerja mencapai target 100%.

- Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah** dalam mencapai target suatu kegiatan adalah dengan telah terbentuknya Forum-forum / mitra kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari :

  a. **Komunitas intelijen daerah (Kominda) mempunyai tugas sbb:**
     - Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, informasi, bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber.

  b. **Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) mempunyai tugas sbb:**
     - Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, gejala dan peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
     - Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Sumbawa Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

  c. **Penanganan konflik sosial mempunyai tugas sbb:**
     - Menyusun rencana aksi terpadu penenaganan konflik sosial tingkat kabupaten/kota.
     - Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten/kota.
     - Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penangannya.
     - Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
     - Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan
     - Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- **Tim Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi serta kondisi daerah mempunyai tugas sbb:**
     - Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
     - Menjaring, mengumpulkan dan melaporkan segala jenis kejadian/konflik yang akan, tengah dan telah terjadi kepada kepala daerah secara berkesinambungan.

- Pencapaian keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh keselarasan sasaran dengan program/kegiatan yaitu Program Pengkajian Masalah Startegis dan Penanganan Konflik Daerah meliputi:
  1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi Serta Kondisi Daerah
  2. Penyelarasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
  3. Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
  4. Penanganan Konflik Sosial
- Pencapaian sasaran " **Meningkatnya Evektifitas Pencegahan Konflik di Daerah"** dengan indikator Zero konflik sehingga capaian kinerja mencapai target, didukung oleh anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- sampai 31 Desember 2019 terealisasi Rp. 346.969.500,- (99,13) terdapat efisiensi anggaran mencapai 0,87 persen dengan pencapaian fisik 87,03 persen.

SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Real. 2017	Real. 2018	2019		Capaian kinerja 2019 terhadap (%)			Capaian kinerja s.d 2019 terhadap target akhir RPJMD		Capaian kinerja s.d 2019 terhadap target nasional	
				Target	Real	Real. 2017	Real 2018	Target 2019	Target/kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasioal	Capaian kinerja (%)
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada/pemilu	-	68,71			-	68,71		95	72	-	-

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada pelaksanaan pilkada sehingga untuk Realisasi kinerja 2016 dan 2017 tidak dapat dilakukan pengukuran.

Jumlah surat suara dalam pelaksanaan pemilu/pilkada yaitu

1. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden th. 2019 sebesar 93.184 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 80.817 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 86,7%.

2. Pemilihan Pemilu DPR-RI di Kabupaten Sumbawa Barat th. 2019 sebesar 92.887 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 80.378 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 86,5%.
3. Pemilihan Pemilu DPD-RI Wakil Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa Barat th. 2019 sebesar 93.094 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 80.578 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 86,5%.
4. Pemilihan Pemilu DPRD Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa Barat th. 2019 sebesar 94.007 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 80.353 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 85,4%.
5. Pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat
   - DAPIL 1 th. 2019 sebesar 36.240 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 31.198 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 86,8%.
   - DAPIL 2 th. 2019 sebesar 36.335 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 32.055 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 88,2%.
   - DAPIL 3 th. 2019 sebesar 20.618 DPT dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih 17.037 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 82,6%.

<u>Pemerintah</u>

- Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak suara pada pilkada/pemilu.

.

- Program kegiatan yang menunjang sasaran Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada pemilu yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat meliputi:
  1. Penyusunan kebijakan politik masyarakat
  2. Sosialisasi Pilkada/Pemilu bagi Pemilih pemula
  3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  4. Pemantauan pelaksanaan pilkada/pemilu
  5. Verifikasi administrasi parpol
  6. Bimbingan teknis kelembagaan bagi orpol/ormas dan LSM

B. Realisasi Anggaran.

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Uraian (Program/Kegiatan)	Pagu	Realisasi	%
1.	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja internal SKPD.**	Realisasi Anggaran	Program Pelayanan adminstrasi perkantoran	313,362,000	286,695,965	*91.49*
1.2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*2,335,000*	*2,335,000*	100.00
1.6			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	*18,362,000*	17,443,665	95.00
1.7			Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	*12,835,000*	*12,835,000*	100.00
1.12			Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	*5,920,000*	*5,920,000*	100.00
1.16			Penyediaan bahan logistik kantor	*9,050,000*	9,045,000	99.94
1.20			Penyediaan jasa administrasi perkantoran	*264,860,00*	239,117,300	90.28

2			Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur	*248,329,250*	*244,698,450*	98.54
2.7			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	*12,696,000*	*12,696,000*	100
2.9			Pengadaan peralatan gedung kantor	*83,376,800*	*79,746,000*	95.65
2.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	*148,451,450*	*148,451,450*	100
2.28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	*3,805,000*	*3,805,000*	100
6			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	*6.572.000,00*	*5.992.000,00*	91,18
6.4			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	*1,292,000*	*1,292,000*	100
6.5			Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	*9,845,000*	*9,730,000*	98
8.1			Pendatan dan penataan	*27,748,000*	*27,453,000*	98.93

			dokumen/arsip kepegawaian			
8.2			Pengurusan Administrasi kepegawaian	*4.975.000,*	*4.950.000,*	99.49
9			Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	*786,000*	*786,000*	100
9.3			Penyusunan rencana kinerja tahunan	*786,000*	*786,000*	100
9.7			Penyusunan renja SKPD	*967,750*	*967,750*	100
9.8			Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	*5,950,000*	*5,900,000*	99.15
9.10			Monitoring dan evaluasi perencanaan SKPD	*11.120.000,*	*11.120.000,*	100
21	**Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.**	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA di daerah	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	*345.138.000,00*	334.374.000 ,00	96,88
21.2			Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya	*49,000,000*	*48,725,000*	99.44

			bangsa			
21.5			Penyelerasan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	*30,000,000*	29,930,000	97,01
21.6			Penyelenggaraan Forum pembauran kebangsaan (FPK)	*91,000,000*	89,719,042	98,59
21.9			Pendidikan wawasan kebangsaan (PWK)	*30,000,000*	29,415,000	98,05
22	**Meningkatnya efektifitas pencegahan konflik di daerah.**	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik	Program Pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik daerah	*350,000,000*	346,969,500	99.13
22.1			Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi serta kondisi daerah	*50,000,000*	*49,230,000*	98.46
22.2			Penanganan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)	50,000,000	49,940,000	99.88
22.4			Penyelenggaraan	175,000,000	172,805,500	98.75

			komunitas intelijen daerah (KOMINDA)			
22.6			Penanganan konflik sosial	75,000,000	74,994,000	99.99
23	**Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat.**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Program Pendidikan politik masyarakat	*525,725,000*	*242,655,000*	96.02
23.3			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	*44.936.000,00*	44,078.000,00	98,09
23.10			Pemantauan pelaksanaan pilkada/pemilu	*108,739,000*	*104,299,000*	95.92
23.13			Verifikasi administrasi aprpol	*56,770,000*	*56,435,000*	99.41
23.14			Bimbingan tekhnis kelembagaan bagi orpol/ormas dan LSM	*65,056,000*	*59,761,000*	91.86

BAB IV
PENUTUP

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat disusun sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban yang berisi informasi dan saran yang telah diolah sesuai Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan selama tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan dukungan dan kekuatan yang dimiliki berupa tugas pokok dan fungsi organisasi serta dukungan dana APBD Kabupaten Sumbawa Barat. Namun tentu saja hasil yang diperoleh belum optimal karena adanya beberapa kendala dari kelemahan.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan memprogramkan pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan sistem administrasi arsip kepegawaian, Program peningkatan sistem perencanaan keuangan perangkat daerah, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik daerah, program pendidikan politik masyarakat yang terinci dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Taliwang, 31 Desember 2019
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri

ABDUL HAMID, S.Pd
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19641231 198605 1 177